

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya era otonomi daerah di Indonesia yang menghendaki daerah harus inovatif dalam mencari sumber pendapatan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Hal ini menjadikan setiap daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengendalikan wilayahnya sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik dalam pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah selalu memerlukan pendapatan yang dapat diandalkan.

Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurut UU No.23 tahun 2014, disebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan

Damas (2017:8) Pendapatan seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Dari hal ini

dapat disimpulkan bahwa penerimaan PAD yang tinggi dari suatu daerah akan berdampak pada tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah didukung dengan beberapa komponen, yaitu :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 8 tahun 2023, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu objek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Di Sumatera Barat, sektor perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memegang peranan penting dalam meningkatkan PAD. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, kedua jenis pajak tersebut menyumbang lebih dari 50% dari total penerimaan PAD provinsi setiap tahunnya (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2022).

Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk di Sumatera Barat menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut. Selain itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan pemerintah provinsi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Arianti & Syofyan, 2019).

Berikut data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019-2023 Di Provinsi Sumatera Barat :

**Tabel 1.1**

**Data Penerimaan PKB dan BBNKB Tahun 2019-2023 di Provinsi Sumatera Barat**

TAHUN	PKB	BBNKB
2019	723.595.692.600	398.566.046.450
2020	707.337.750.877	279.555.528.500
2021	767.095.347.600	393.834.433.750
2022	861.058.721.400	421.619.417.100
2023	821.504.582.450	402.373.771.150

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat semakin meningkat setiap tahunnya. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023. Dari data diatas menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang signifikan dalam penerimaan pajak daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan kedua jenis pajak ini, seperti adanya tunggakan pajak, masalah administratif, serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis tentang **“Pengaruh Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah pengaruh pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat?

3. Bagaimanakah pengaruh pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada, penelitian dalam kegiatan magang ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Dari penulisan ini begitu banyak manfaat yang dapat diambil oleh penulis, peserta magang, universitas dan bahkan untuk perusahaan tempat magang, yaitu :

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Memperoleh gambaran seperti apa dunia kerja nantinya dan kita juga bisa merasakan bagaimana situasi dunia kerja yang sebenarnya. pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu perpajakan yang di peroleh dalam

mata kuliah perpajakan yang dimulai pada semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat).

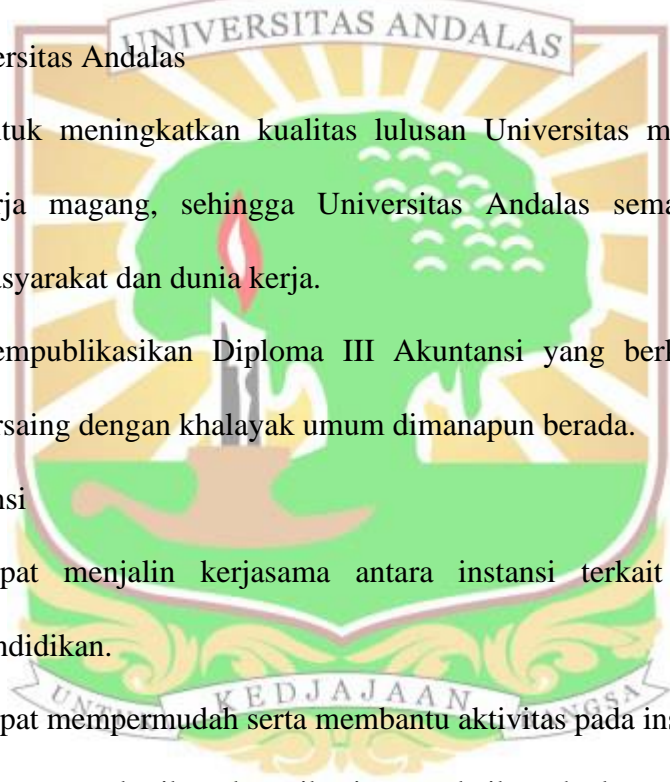
- b. Menambah pengetahuan penulis tentang Pajak Daerah.
- c. Menambah pengetahuan penulis tentang Pendapatan Asli Daerah.
- d. Mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama kegiatan magang dan mengaplikasikannya dalam dunia kerja.

2. Bagi Universitas Andalas

- a. Untuk meningkatkan kualitas lulusan Universitas melalui pengalaman kerja magang, sehingga Universitas Andalas semakin dikenal oleh masyarakat dan dunia kerja.
- b. Mempublikasikan Diploma III Akuntansi yang berkualitas serta siap bersaing dengan khalayak umum dimanapun berada.

3. Bagi Instansi

- a. Dapat menjalin kerjasama antara instansi terkait dengan lembaga pendidikan.
- b. Dapat mempermudah serta membantu aktivitas pada instansi.
- c. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.
- d. Meningkatkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.



## 1.5 Metode Pengumpulan Data

### a. Metode Observasi

yaitu dengan cara mengumpulkan dan mencatat data langsung dilokasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### b. Metode Interview

yaitu dengan berkomunikasi secara langsung dengan rekan kerja atau karyawan tetap untuk mendapatkan informasi, wawasan, atau pendapat mereka.

### c. Metode Library

yaitu dengan melakukan penelitian dan studi menggunakan sumber daya perpustakaan, termasuk buku, jurnal, artikel, dan database elektronik untuk mencari informasi yang relevan untuk topik atau proyek.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat uraian yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Metode, Tempat dan Waktu serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dijelaskan teori Perpajakan, Perpajakan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruh Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Bagian ini akan menjelaskan tentang profil Kantor Badan Pendapatan Daerah yang meliputi sejarah berdiri, lokasi, dan struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang kontribusi Pengaruh Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan dan juga saran yang ditulis oleh penulis.

